



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
**KPKNL TASIKMALAYA**



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KPKNL Tasikmalaya



**Hari Kekayaan Negara**  
Transformasi Pelayanan Menuju Indonesia Maju

Selamat Hari Kekayaan Negara (HKN) Ke - 18  
1 November 2024



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Tugas, Fungsi, Visi – Misi, dan Struktur Organisasi KPKNL Tasikmalaya...	2
B. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issue</i> ) KPKNL Tasikmalaya.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. Rencana Strategis.....	10
B. Penetapan Kinerja.....	12
C. Addendum Kontrak Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
1. Perbandingan Target Awal Tahun Dan Realisasi Kinerja 2024.....	27
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan:	
a Capaian Kinerja Dalam Kurun Waktu Sampai Dengan Lima Tahun Terakhir.....	27
b Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kementerian Keuangan (2019 – 2024).....	28
c Target Pada Rencana Kerja Kemenkeu Tahun 2024.....	32
3. Upaya-Upaya <i>Extra Effort</i> Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja.....	33
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	38
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja).....	45
7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Yang Telah Disusun Dalam Pencapaian Kinerja.....	47
8. Rencana Aksi Ke-Depan.....	48
B. Kinerja Lainnya.....	51
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024.....	52
BAB IV PENUTUP .....	53
Lampiran	55
Prestasi KPKNL Tasikmalaya Tahun 2024	

## BAB I PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang menerapkan reformasi birokrasi sesuai amanat peraturan perundangan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan dan kinerja dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Tasikmalaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja diantaranya melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 55/KMK.01/2020 tentang Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2020 -2024.
5. Keputusan Menteri Keuangan nomor 56/PMK.01/2021 tentang Pedoman standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: Kep-60/KN/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Di samping hal-hal tersebut di atas, KPKNL Tasikmalaya sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara. Sebagai Kantor yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2019 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2022, KPKNL Tasikmalaya selalu berusaha menjaga integritasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta praktik penerimaan gratifikasi di semua jenis pelayanannya, baik di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang serta melakukan pengamanan kekayaan negara dengan melakukan pengadministrasian dan penilaian aset negara. KPKNL Tasikmalaya juga berhasil mempertahankan Predikat ZI-WBBM Tahun 2022 melalui Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI-WBBM di Lingkungan DJKN Tahun 2024. Dengan selalu menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan maksimal, KPKNL Tasikmalaya terus berupaya untuk menjadi Kantor Pelayanan terbaik dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

## **A. Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi, dan Struktur Organisasi KPKNL Tasikmalaya**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Dalam rangka pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Indikator peningkatan kinerja instansi pemerintah dapat dilihat melalui ukuran pengelolaan keuangan yang sehat dan modern, pengukuran kinerja dengan indikator capaian, dan keterkaitan kegiatan dengan program instansi.

Dinamika organisasi merupakan salah satu faktor yang tak terelakkan dalam perkembangan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Seiring perkembangan teknologi serta digitalisasi, penyelarasan peta proses bisnis Kementerian Keuangan, dan arah kebijakan kelembagaan secara nasional, Kementerian Keuangan khususnya DJKN terus melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan kelembagaan. Penyelarasan organisasi pemerintah sesuai dengan peta proses bisnis tersebut dilakukan agar instansi DJKN mampu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan berdasarkan kebutuhan pelayanan di masa depan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Tasikmalaya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). KPKNL Tasikmalaya juga berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. KPKNL Tasikmalaya berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara).

Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Tasikmalaya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

### V I S I

“Menjadi pengelola kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel bertanggung untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### M I S I

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Tasikmalaya telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan motto **“PASTI”, Profesional, Amanah, Santun, Transparan, Inovatif** kami optimis dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Melalui motto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Tasikmalaya dapat semakin baik dan maju bersama menuju arah yang lebih baik dengan dilandasi 3ertical dalam diri, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi 3ertical di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Tasikmalaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, Pengadministrasian, Pendayagunaan, Pengamanan Kekayaan Negara;
2. Registrasi, Verifikasi Dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan Serta Penghapusan Kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara Dan Lelang;

8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran Piutang Negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Guna melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah dilakukan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun struktur organisasi KPKNL terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi KPKNL dengan 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing di bawah Kepala Kantor dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Struktur Organisasi KPKNL Tasikmalaya

KPKNL Tasikmalaya berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan didukung oleh 1 (satu) subbagian, 4 (empat) seksi, beserta Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang kerja yang ditetapkan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPKNL Tasikmalaya dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasinya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang dirinci sesuai jabatan dan kedudukan sebagai berikut:

i	Kepala Kantor	:	1 (satu) pegawai
ii	Subbagian Umum	:	5 (lima) pegawai
iii	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	:	4 (empat) pegawai
iii	Seksi Piutang Negara	:	4 (empat) pegawai
iv	Seksi Hukum dan Informasi	:	4 (empat) pegawai
v	Seksi Kepatuhan Internal	:	3 (tiga) pegawai
vi	Jabatan Fungsional Pelelang	:	4 (empat) pegawai
vii	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	:	2 (dua) pegawai
viii	Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN	:	1 (satu) pegawai
ix	PPNPN (Pramu Administrasi, Pramu Administrasi/APT, Pramu Kebersihan, Pramu Saji, Satuan Pengamanan)		12 (dua belas) pegawai

## B. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*) KPKNL Tasikmalaya

Sudah barang tentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya (proses bisnis) dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, permasalahan utama (*strategic issues*) dihadapi KPKNL Tasikmalaya, antara lain :

### 1. Permasalahan di Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara

Meskipun selama ini KPKNL Tasikmalaya selalu berhasil mencapai target di Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara, namun demikian kenyataan di lapangan ada beberapa kendala/permasalahan yang timbul, yaitu :

#### a. Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal)

Ada beberapa satker yang kurang sadar dalam menertibkan secara mandiri apabila ada pemanfaatan BMN yang belum mendapatkan persetujuan dari KPKNL.

#### b. Pengelolaan BMN.

Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN telah ditangani secara tuntas administrasi sebab risiko ini hanya ditindaklanjuti dengan hanya memberikan surat himbauan. Masih Kurangnya kesadaran sebagian satker di K/L dalam pengajuan permohonan pengelolaan BMN, sehingga untuk pengguna barang tertentu masih sangat sedikit pengajuannya. Ada beberapa BMN yang ditengarai dilakukan pemanfaatan namun belum diajukan permohonannya kepada pengelola barang. Untuk pemanfaatan sewa bahwa target sudah hampir sebanding dengan potensi yang ada di KPKNL Tasikmalaya.

#### c. Aplikasi.

Permasalahan Aplikasi pada PKN lebih banyak terjadi pada penerapan aplikasi SIMAN V2 di antara permasalahan tersebut adalah :

Masih banyak menu dalam aplikasi SIMAN V2 yang perlu disempurnakan, kurang user friendly, harus diberikan pelatihan secara berkala agar dapat berjalan dengan baik. Peralihan Aplikasi SIMAN menuju penggunaan SIMAN V2 masih perlu upaya lebih keras agar KPKNL Tasikmalaya sebagai pengelola dapat menguasai dan memberikan sosialisasi yang baik kepada satuan kerja. Operator BMN di tingkat satker yang merangkap tugas di luar penatausahaan BMN sehingga kurang folus dalam mengoperasikan SIMAN V2.

## 2. Permasalahan di Pelayanan Pengurusan Piutang Negara :

Priangan Timur sebagai wilayah kerja Pengurusan Piutang Negara KPKNL Tasikmalaya, dalam proses penyelesaian piutang negaranya sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, budaya, dan kesadaran masyarakatnya. Permasalahan di Pelayanan pengurusan piutang negara ini sangat erat hubungannya dengan pencapaian target baik target penyelesaian piutang maupun target penerimaan negara dari pengurusan Piutang Negara. Mayoritas piutang negara yang diurus (sekitar 90%) merupakan penyerahan dari Pemerintah Daerah/Pusat yang merupakan program bantuan kredit masyarakat menengah ke bawah, dan penyerahan Rumah Sakit Umum Daerah berupa tagihan rawat pasien yang notabene kemampuan secara ekonomi untuk menyelesaikan utangnya relatif tidak besar.

### a. Persentase penurunan outstanding piutang negara tahun 2024 : 126,69%

BKPN yang dalam pengurusan KPKNL Tasikmalaya sebagian besar merupakan BKPN yang tidak lengkap, yaitu BKPN yang tidak didukung barang jaminan, barang jaminan tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang lengkap, nilai barang jaminan yang tidak menutup nilai utang, dan kurangnya kemampuan ekonomi debitur untuk melunasi kewajibannya. Selain itu utang yang diurus merupakan piutang negara non perbankan yang nominalnya sebagian besar relatif tidak besar. BKPN yang diperhitungkan adalah seluruh BKPN dan tidak didukung barang jaminan. Oleh karenanya penyelesaian piutang negara pada tahun 2024 sebagian besar penyelesaian secara administratif (PSBDT sebanyak 107 BKPN), dan selebihnya penyelesaian berupa pelunasan melalui mekanisme keringanan utang (Crash Program sebanyak 65 BKPN), pelunasan biasa sebanyak 4 BKPN, serta penarikan pengurusan piutang negara oleh Penyerah Piutang karena restrukturisasi utang sebanyak 3 BKPN.

Atas BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan yang masuk ke dalam penyelesaian kategori II yakni atas seluruh BKPN perolehan 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2023, dan atau ada jaminan namun hanya berupa letter C, Seksi PN telah melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas terkait status hukum barang yang menjadi jaminan, dan agar terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak penyerah piutang dengan KPKNL Tasikmalaya karena masing-masing pihak memiliki target terkait penyelesaian piutang.

### b. Persentase saldo berkas kasus piutang negara (BKPN) tahun 2024 : 233,77%

Pencapaian persentase saldo berkas kasus piutang negara (BKPN) untuk tahun 2024 diperoleh dari penyelesaian utang secara administratif berupa PSBDT

sebanyak 107 BKPN yang berasal dari penyerahan Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak didukung dengan barang jaminan dan telah dilakukan penagihan secara optimal akan tetapi kemampuan debitor dan/atau ahli warisnya secara ekonomi tidak ada.

Penyelesaian pengurusan piutang negara pada tahun 2024 berupa pelunasan melalui mekanisme keringanan utang (Crash Program sebanyak 65 BKPN), pelunasan biasa sebanyak 4 BKPN, serta penarikan pengurusan piutang negara oleh Penyerah Piutang karena restrukturisasi utang sebanyak 3 BKPN.

### **3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian**

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pada Seksi pelayanan penilaian sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data pasar yang tersedia di lapangan karena masyarakat belum terbuka terhadap transaksi tanah;
- b. Tidak tersedianya alat bantuukur dalam pelaksanaan penilaian.

### **4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang**

Dalam pelaksanaan pelayanan lelang masih terdapat beberapa Permasalahan di Unit Layanan Lelang, antara lain:

- a. Lelang TAP (Tanpa Ada Penawaran) masih tinggi sehingga target tidak tercapai;
- b. Pelaksanaan lelang di tahun 2024 didominasi lelang eksekusi barang tidak bergerak yang sulit dicairkan;
- c. Obyek lelang tanah sebagian besar masih dihuni oleh pemiliknya;
- d. Harga masih menggunakan nilai pasar;
- e. Aplikasi lelang.go.id belum dikenal secara luas oleh masyarakat di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya (Kota Tasikmalaya dan Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran) sehingga masyarakat belum familiar membeli barang secara *online* menggunakan website atau aplikasi Lelang Indonesia;
- f. Informasi yang ditampilkan pada website lelang.go.id belum informatif misalnya belum adanya kewajiban mencantumkan nomor kontak penjual.

### **5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi**

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengembalian uang jaminan lelang, masih terdapat peserta lelang mencantumkan nomor rekening, nama rekening dan nama Bank yang salah, sehingga menghambat Bendahara Penerima dalam pengembalian tepat waktu dan akhirnya terjadi miskomunikasi antara peserta lelang tersebut dengan Bendahara Penerima, selain itu masih terdapat beberapa peserta lelang yang tidak mencantumkan nomor telepon sehingga apabila terdapat kendala dalam pengembalian uang jaminan lelang tidak bisa melakukan konfirmasi ke peserta lelang yang bersangkutan.
- b. Tidak adanya pernyataan yang jelas pada penggunaan NPWP untuk penyeteroran PPh final pada transaksi lelang, mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran penggunaan NPWP pada masing-masing KPKNL. Hal tersebut juga dilatarbelakangi karena perbedaan kebijakan dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya sehingga Bendahara Penerimaan

mengalami hambatan setiap akan menyetorkan PPh Final yang berasal dari transaksi lelang.

#### **6. Permasalahan pada Subbagian Umum**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum serta dalam pencapaian target kinerja di Subbagian Umum, permasalahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, diantaranya:

- a. Kendala pada ketersediaan SDM pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengemban tugas pada Jabatan Fungsional Bendahara dan Penata Laksana Barang. Jabatan Bendahara, apabila bukan diemban oleh jabatan fungsional maka harus diemban oleh pegawai yang telah mengikuti diklat dan berstatus BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi). Tusi bendahara yang bersifat spesifik, sangat terpengaruh oleh adanya mutasi pegawai. Apabila terdapat mutasi keluar jafung bendahara dan tidak digantikan juga oleh jafung bendahara, membutuhkan waktu penyiapan pegawai untuk mengikuti diklat bendahara dan proses sertifikasi bendahara. Selain bendahara, tusi lain yang semakin khusus, adalah penata laksana BMN. Saat ini penatalaksanaan BMN dilakukan oleh pegawai yang bukan Jafung Penata Laksana Barang.
- b. Ada syarat tertentu yang harus dimiliki oleh suatu pemegang jabatan di mana merekaharus mengikuti diklat untuk menunjang kemampuan menjalankan tugas. Sebagai contoh untuk Pejabat Penguji SPM yang dahulu dijabat oleh Kasubbag Umum secara *ex officio*, saat ini harus mengikuti diklat Penguji SPM yang keikutsertaannya menunggu dalam waktu yang lama karena keterbatasan kuota peserta. Perlu adanya terobosan agar Kasubbag Umum yang belum mengikuti diklat PPSPM dapat diprioritaskan untuk bisa memenuhi syarat sebagai Pejabat Penguji SPM.

#### **7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal**

Isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Kepatuhan Internal, yaitu:

- a. Peraturan dan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pada Seksi Kepatuhan Internal secara dinamis mengalami perubahan dari Kantor Pusat DJKN sehingga memerlukan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam pelaksanaannya.
- b. Adanya kepentingan dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPKNL menyebabkan kemungkinan adanya moral hazard atau konflik kepentingan yang dapat menghambat kelancaran tugas, sehingga diperlukan integritas dan penerapan prinsip kehati-hatian.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tasikmalaya berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2024 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun ringkasan/ikhtisar capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2024 KPKNL Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(30%)							33,18%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							110,60%
1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	175,87%	14%	42%	175,87%	120,00%
1b-CP	Indeks integritas	P/L	89,17	92,44	19%	58%	103,67%	103,67%
	Customer Perspective(20%)							23,49%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							117,80%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	P/L	71,50%	88,02%	19%	50%	123,10%	120,00%
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	P/L	86,50%	100,00%	19%	50%	115,61%	115,61%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							120,00%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	156,25%	14%	50%	156,25%	120,00%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	126,69%	14%	50%	126,69%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							114,59%
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75,00	85,94	14%	100%	114,59%	114,59%
	Internal process (25%)							30,00%
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							120,00%
5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100,00%	122,34%	14%	50%	122,34%	120,00%
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100,00%	125,11%	14%	50%	125,11%	120,00%
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							120,00%
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	P/M	77,00%	57,75%	14%	50%	125,00%	120,00%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89,00%	120,00%	14%	50%	134,83%	120,00%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16,00%	0,78%	14%	100%	195,13%	120,00%
	Learning & Growth Perspective (25%)							29,57%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,14%
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	P/M	90,00%	102,80%	14%	50%	114,22%	114,22%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85,00	95,24	14%	50%	112,05%	112,05%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00%
9a-CP	Indeks kualitas anggaran	P/M	100,00	120,00	14%	50%	120,00%	120,00%
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10,00%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%
10	Komunikasi publik yang efektif							120,00%
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80,00	100	14%	100%	125,00%	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							120,00%
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	P/M	82,00	99,15	14%	50%	120,91%	120,00%
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100,00	120,00	14%	50%	120,00%	120,00%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>116,24%</b>

## A. Rencana Strategis

### 1. Misi

Misi KPKNL Tasikmalaya adalah :

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik administrasi dan hukum.
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna.

### 2. Tujuan

KPKNL Tasikmalaya mempunyai tujuan organisasi yakni mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggungjawab, profesional dan dipercaya masyarakat pengguna jasa di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya.

### 3. Sasaran

Sasaran yang hendak dituju KPKNL Tasikmalaya adalah :

- 1) Perwujudan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Pengamanan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- 3) Perwujudan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Pelaksanaan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Perwujudan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna, efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif.

### 4. Kebijakan

Kebijakan adalah implementasi dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan-kebijakan KPKNL Tasikmalaya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pekerjaan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan monitoring pelaksanaan diklat wajib, mengajukan diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.
- 3) Menerapkan standarisasi kerja yang berbasis pada integritas, ketulusan dan komitmen.
- 4) Menerapkan percepatan proses di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian.
- 5) Menerapkan sistem aplikasi dibidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian yang berbasis pada teknologi informasi.

- 6) Meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan informasi yang meliputi percepatan proses penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi) dan pemberian keterangan atau informasi kepada pihak terkait.

#### 5. Program Kerja

Program kerja yang ditetapkan KPKNL Tasikmalaya tidak terlepas dari kebijakan yang telah diambil dan menjadi acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Program kerja KPKNL Tasikmalaya meliputi program kerja yang terurai kedalam program kerja masing-masing unit kerja. Berikut Program Kerja KPKNL Tasikmalaya :

##### 1) Pelayanan Lelang

- Memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa lelang;
- Memberikan konsultasi kepada stakeholder tentang peraturan, syarat dan prosedur lelang;
- Melaksanakan lelang online secara optimal;
- Mempercepat proses penyelesaian Risalah Lelang baik minuta, kutipan maupun salinan tepat waktu;
- Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemohon lelang;
- Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

##### 2) Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

- Mempercepat proses pengurusan Piutang Negara untuk berkas kasus Piutang Negara yang baru diserahkan;
- Melakukan kegiatan bersifat persuatif guna menggugah kesadaran debitur agar mau mengangsur hutang mengingat kegiatan eksekusi sudah tidak dapat dilakukan;
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan penyerah piutang;
- Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

##### 3) Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara

- Memberikan pelayanan prima dengan memberikan pengarahan dan perbantuan optimal dalam implementasi program SIMAN;
- Mempercepat proses permohonan utilisasi dengan tidak mengurangi kecermatan dan kelengkapan berkas permohonan;
- Mengelola kekayaan negara dengan efektif dan efisien;
- Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

##### 4) Pelayanan Penilaian

- Mempercepat proses permohonan penilaian baik penilaian BMN maupun penilaian barang jaminan hutang dengan tepat waktu dan berkualitas;
- Menyelesaikan penilaian kembali (revaluasi).
- Menyusun database penilaian guna mendukung informasi penilaian yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan;
- Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

- 5) Pelayanan Hukum dan Informasi
  - Memberikan pelayanan yang optimal dalam setiap permohonan verifikasi jumlah hutang dalam rangka penerbitan SPPNS, SPPNL dan PSBDT;
  - Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan layanan hukum yang efektif;
  - Memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi;
  - Menerapkan aplikasi Sibankum;
  - Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;
  
- 6) Pelayanan Subbagian Umum
  - Memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh unit kerja KPKNL Tasikmalaya dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara maksimal;
  - Memberikan dorongan pembentukan SDM yang berintegrasi dan berkompotensi tinggi;
  - Mengelola anggaran dengan optimal;
  - Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

## B. Penetapan Kinerja

### 1. Perjanjian Kinerja

Mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggung jawab, profesional dan dipercaya masyarakat di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya merupakan misi KPKNL Tasikmalaya. Untuk mewujudkan misi tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat selaku pejabat tertinggi di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dengan Kepala KPKNL Tasikmalaya. Dalam perjanjian kinerja tersebut memuat butir-butir yang telah ditetapkan dalam garis besar peta strategi Utama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yaitu :

- 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
- 2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
- 3) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
- 4) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
- 5) Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif;
- 6) Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif;
- 7) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
- 8) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
- 9) Pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- 10) Komunikasi publik yang efektif;
- 11) Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah;

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Tasikmalaya :

1. Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
2. Indeks integritas
3. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan
4. Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN
5. Persentase realisasi pokok lelang
6. Persentase penurunan outstanding piutang negara
7. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian
8. Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan
9. Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)
10. Persentase saldo berkas kasus piutang negara
11. Persentase produktivitas lelang
12. Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
13. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
14. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko
15. Indeks kualitas anggaran
16. Persentase deviasi data PNBPN Fungsional DJKN
17. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)
18. Indeks Efektivitas UKI
19. Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
TASIKMALAYA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp5,502 M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp94,455 M)
		3b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100 (Rp5 M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	70
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	100
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	82 (351)
		6b-CP Persentase produktivitas Lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi	8a-N Persentase pengembangan	90

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan SDM yang adaptif	kompetensi pegawai	
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kualitas kinerja pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase Deviasi PNBP Fungsional DJKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks Efektivitas UKI	82
		11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBBM	100

No.	Program/Kegiatan		Anggaran
	<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp</b>	<b>445.533.000</b>
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	26.343.000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	-
3.	Pengelolaan Aset	Rp	419.190.000
4.	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	-
5.	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	-
6.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	-
	<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>3.403.472.000</b>
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	15.544.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.352446.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	22.208.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	-
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	13.274.000
6.	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp	-

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Jawa BaratKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang TasikmalayaDitandatangani Secara Elektronik  
Tavianto NoegrohoDitandatangani Secara Elektronik  
Thamrin

## Sasaran Kinerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Thamrin	NAMA	Tavianto Noegroho
NIP	196911191996031001	NIP	196507291991031002
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

NO	RENCANA HASIL KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100 (Rp5,502 M)	Penerima Layanan
		1b-CP Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Penerima Layanan
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp94,455 M)	Penerima Layanan
		3b-CP Persentase penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara	100	Penerima Layanan
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	70	Penerima Layanan
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100 (351 BKPN)	Proses Bisnis
		6b-CP Persentase produktivitas Lelang	89	Proses Bisnis
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	Proses Bisnis
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	Penguatan Internal atau anggaran
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau anggaran
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	9a-CP Indeks kualitas kinerja pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau anggaran
		9b-CP Persentase Deviasi PNPB Fungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau anggaran
10	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau anggaran
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	11a-N Indeks efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau anggaran
		11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBBM	100	Penguatan Internal atau anggaran

B. KINERJA TAMBAHAN			

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan <ul style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>Membantu orang lain belajar</li> <li>Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>Suka menolong orang lain</li> <li>Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal <ul style="list-style-type: none"> <li>Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

	Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif <ul style="list-style-type: none"> <li>Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>Bertindak proaktif</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
 Tamrin  
 NIP 196911191996031001

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
 Tavianto Noegroho  
 NIP 196507291991031002

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp3.881.860.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp3.487.887.835,-

C. Adendum Kontrak Kinerja

1. Terdapat adendum pada Target PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan pada Tahun 2024 dengan nilai

- PNBP BMN : Rp. 4.436.466.592,00
- PNBP Lelang : 5.687.995.179,00
- PNBP Piutang Negara : Rp. 11.268.829,00
- Total PNBP : Rp 5.763.055.500,00

2. Adendum pada Target Penurunan Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara Tahun 2024 dari 351 menjadi 329 BKPN pada rencana kerja hasil Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara.

**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA**  
NOMOR: 05A/WKN.08/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-05/WKN.08/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula				Menjadi			
		Indikator Kinerja	Target	9a-CP	Indeks kualitas kinerja pelaksanaan anggaran	Indikator Kinerja	Target	9a-CP	Indeks kualitas anggaran
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	100		9a-CP	100			

B. Perubahan Rincian Target Kinerja


Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi								
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y		
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	30	30	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5

3a-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5	3a-CP	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
3a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	6	100%	100	3a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	90	90	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	80	80	90	90
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-N	Indeks Efektivitas LKI	-	-	-	-	-	82	82	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Keptuhan Internal (UKI)	5	15	15	20	20	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBEM	-	-	-	-	-	100	100	11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBEM	100	100	100	100	100	100	100


Bandung, 31 Mei 2024

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat,



Dilandatangani secara elektronik  
Tugas Agus Priyo Waluyo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya



Dilandatangani secara elektronik  
Iharnin

**ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI**

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai**

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9a-CP	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kualitas kinerja pelaksanaan anggaran	100	Pengukuran Internal atau Anggaran

Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9a-CP	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran	100	Pengukuran Internal atau Anggaran

**B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai**

No.	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							No.	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	2	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan	30	50	50	60	60	71,5	71,5

No.	Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Sebelum							No.	Standar Barang dan Standar Kebutuhan	Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
4	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5	4	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40%	40	60	60	100	100
13	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15	40	40	75	75	90	90	13	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	80	80	90	90
15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	15	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	18	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	5	13	15	20	20	82	82
19	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBBM	-	-	-	-	-	100	100	19	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Thamrin

Bandung, 31 Mei 2024

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Tugas Agus Priyo Waluyo

**ADENDUM PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: 05B/WKN.08/2024**

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-05/WKN.08/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-05A/WKN.08/2024 tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Perubahan Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (5,502M)	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (5,733M)
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	82 (351)	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	77 (330)

**B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Utama**

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	99	95	95	88	88	82	82 (351)	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	99	95	95	88	88	77	77 (330)

Bandung, 20 November 2024

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya



Ditandatangani secara elektronik  
Tugas Agus Priyo Waluyo



Ditandatangani secara elektronik  
Thamrin

**ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI**

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai**

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (5,502M)	Penerima Layanan
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	82 (351BKPN)	Proses Bisnis
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (5,733M)	Penerima Layanan
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	77 (330 BKPN)	Proses Bisnis

**B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai**

No.	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							No.	Indikator Kinerja Individu	Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
6	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	99	95	95	88	88	82	82 (351)	6	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	99	95	95	88	88	77	77 (330)

Bandung, 20 November 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Thamrin



Ditandatangani secara elektronik  
Tugas Agus Priyo Waluyo

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

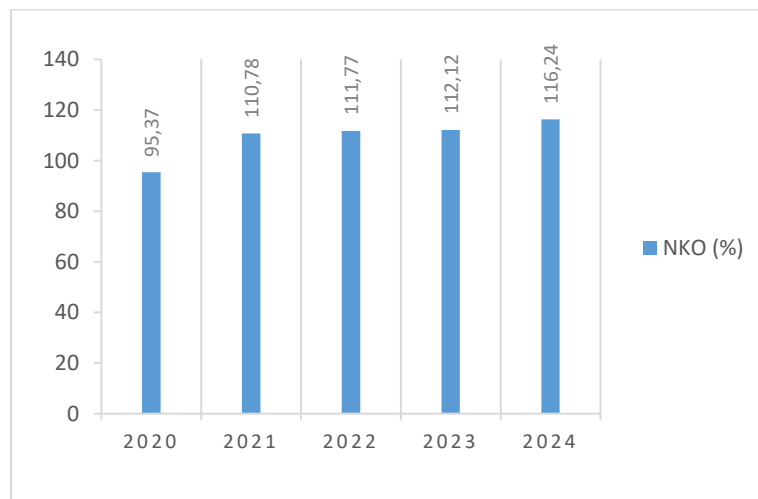
#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1. Perbandingan Target Awal Tahun Dan Realisasi Kinerja 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 ini KPKNL Tasikmalaya bisa mencapai hampir seluruh target yang telah ditetapkan, kecuali untuk target Hasil Lelang dan Produktifitas Lelang, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,24%. Lebih jelasnya di bawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi di Tahun Anggaran 2024:

##### NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

NO	TAHUN	NKO
1	2019	106,02%
2	2020	95,37%
3	2021	110,76%
4	2022	111,77%
5	2023	112,12%
6	2024	116,24%



**Grafik Capaian NKO Tahun 2020-2024**

Pada Tahun Anggaran 2024, KPKNL Tasikmalaya secara umum telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,24% dengan seluruh IKU yang masih tercapai melampaui target. Grafik kenaikan NKO selama 5 tahun terakhir pun selalu naik yang menunjukkan hasil kinerja yang positif. Lebih jelasnya dibawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2024:

- a. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Realisasi yang terdiri dari PNBPN BMN, PNBPN Piutang Negara, dan PNBPN Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya Tahun 2024 sebesar Rp10.135.730.600,00 atau sebesar 175,87% dari total target sebesar Rp18.272.044.500,00. IKU ini belum mencapai target dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian IKU	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	PNBP Pengelolaan BMN	2.831.900.000	4.436.466.592	155.07%
2	PNBP Piutang Negara	11.055.500	11.268.829	101.93%
3	PNBP Lelang	2.891.000.000	5.687.995.179	196.75%
	<b>Total</b>		<b>10.135.730.600</b>	<b>175.87%</b>

Tabel Capaian IKU Tahun 2024

Stakeholder Perspective(30%)									
K-Wide	1.Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan								
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang								
	T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK	Hijau
Realisasi	161.22%	198.46%	198.46%	153.28%	153.28%	175.87%	175.87%		
Capaian	161.22%	198.46%	198.46%	153.28%	153.28%	175.87%	175.87%		

Stakeholder Perspective(30%)									
K-Wide	1.Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan								
	1b-CP Indeks integritas								
	T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	-	89,17	Max / TLK	Hijau
Realisasi	-	-	-	-	-	-	89,17		
Capaian							92,44		
K-Wide	Customer Perspective(20%)								

<b>2.Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa</b>									
<b>2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan</b>									
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	50	50	60	60	71,5	71,5	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	30%	90,68%	90,68%	87,71%	87,71%	88,02%	88,02%		
Capaian	30%	90,68%	90,68%	87,71%	87,71%	88,02%	88,02%		

<b>Customer Perspective(20%)</b>									
<b>2.Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa</b>									
<b>2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN</b>									
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	45	45	-	45	86.5	86.5	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

<b>Customer Perspective(20%)</b>									
<b>3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal</b>									
<b>3a-CP Persentase realisasi pokok lelang</b>									
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP	Ket
Target	100	100	100	100	100	100	100	Ma x/ TLK	Hij au
Realisa si	86,10%	111,45%	111,45%	107,46%	107,46%	156,25%	156,25%		
Capai an	86,10%	111,45%	111,45%	107,46%	107,46%	156,25%	156,25%		

<b>Customer Perspective(20%)</b>									
<b>3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal</b>									
<b>3b-CP Persentase penurunan outstanding piutang negara</b>									
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP	Ket
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK	Hija u
Realisa si	607,02%	100,06%	100,06%	101,11%	101,11%	126,69%	126,6 9%		
Capai an	607,02%	100,06%	100,06%	101,11%	101,11%	126,69%	126,6 9%		

K-Wide	Customer Perspective(20%)								
	4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien								
	4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	86,2	86,19	86,19	85,6	85,6	85,94	85,94		
Capaian	86,2	86,19	86,19	85,6	85,6	85,94	85,94		

K-Wide	Internal process (25%)								
	5. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien								
	5a-CP Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	40	40	60	60	100	100	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	20%	61,42%	61,42%	129,44%	129,44%	122,34%	122,34%		
Capaian	20%	61,42%	61,42%	129,44%	129,44%	122,34%	122,34%		

K-Wide	Internal process (25%)								
	5. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien								
	5b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol /K P	Ket
Target	10	32	32	80	80	100	100	Ma x/ TL K	Hijau
Realisasi	168,89 %	122,8 6%	122,8 6%	115,5 6%	115,5 6%	125,11%	125,11%		
Capaian	168,89 %	122,8 6%	122,8 6%	115,5 6%	115,5 6%	125,11%	125,11%		

K-Wide	Internal process (25%)								
	6. Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif								
	6a-CP Persentase saldo berkas kasus piutang negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	99	95	95	88	88	82	82	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	95,54%	93,90%	93,90%	77,40%	77,40%	57,75%	57,75%		
Capaian	95,54%	93,90%	93,90%	77,40%	77,40%	57,75%	57,75%		

K-Wide	Internal process (25%)								
	6. Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif								
	6a-CP Persentase produktivitas lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	30	45	45	60	60	89	89	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	58,46%	77,82%	77,82%	95,79%	95,79%	120%	120%		
Capaian	58,46%	77,82%	77,82%	95,79%	95,79%	120%	120%		

K-Wide	Internal process (25%)								
	7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
	7a-CP Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	16	16	16	16	16	16	16	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	1,89%	1,20%	1,20%	1,06%	1,06%	0,78%	0,78%		
Capaian	1,89%	1,20%	1,20%	1,06%	1,06%	0,78%	0,78%		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP	Ket
Target	16	16	16	16	16	16	16	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	47,51%	63,11%	63,11%	89,67%	89,67%	102,80%	102,80%		
Capaian	47,51%	63,11%	63,11%	89,67%	89,67%	102,80%	102,80%		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								
	8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	99,125	98,008	98,008	100	100	95,24	95,24		
Capaian	99,125	98,008	98,008	100	100	95,24	95,24		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel								
	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	120	102,63	102,63	99,96	99,96	97,79	97,79		
Capaian	120	102,63	102,63	99,96	99,96	97,79	97,79		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel								
	9b-CP Persentase deviasi data PNPB Fungsional DJKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	10	10	10	10	10	10	10	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	10. Komunikasi publik yang efektif								
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	110	100	100	112	112	100	100		
Capaian	110	100	100	112	112	100	100		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah								
	11a-N Indeks Efektivitas UKI								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	-	-	-	-	-	82	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	5	10	10	20	20	99,15	99,15		
Capaian	5	10	10	20	20	99,15	99,15		

K-Wide	Learning & Growth Perspective (25%)								
	11. Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah								
	11b-N Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP	Ket
Target	-	-	-	-	-	-	100	Max/ TLK	Hijau
Realisasi	100	100	100	100	100	120	120		
Capaian	100	100	100	100	100	120	120		

**2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan**  
**a. Capaian Kinerja Kurun Waktu sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir**

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya :

**PNBP Pengelolaan BMN**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2023	Rp2.550.000.000,00	Rp3.243.336.350,00	127,19%
2	2024	Rp2.831.900.000,00	Rp4.436.466.592,00	156,66%

**PNBP BEA LELANG**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2020	Rp.4.445.000.000,00	Rp.1.703.678.398,00	38,33%
2	2021	Rp.2.239.000.000,00	Rp.2.427.123.439,00	108,40%
3	2022	Rp.2.500.000.000,00	Rp.2.646.298.671,00	105,85%
4	2023	Rp.2.891.000.000,00	Rp.2.792.066.204,00	96,58%
5	2024	Rp2.891.000.000,00	Rp.5.687.995.179,00	196.75%

**POKOK LELANG**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2020	Rp.119.612.000.000,00	Rp.51.324.847.247,00	42,91%
2	2021	Rp.58.000.000.000,00	Rp.88.851.241.809,00	153,19%
3	2022	Rp.56.100.000.000,00	Rp.80.723.133.330,00	143,89%
4	2023	Rp.94.455.000.000,00	Rp.84.884.680.636,00	89,87%
5	2024	Rp.94.455.000.000,00	Rp.147.590.190.014,00	156.25%

**BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2020	Rp.10.000.000,00	Rp.13.402.508,00	134,03%
2	2021	Rp.89.000.000,00	Rp.90.367.154,00	101,54%
3	2022	Rp.10.025.000,00	Rp.10.179.455,00	101,95%
4	2023	Rp.10.050.000,00	Rp.15.075.402,00	150,00%
5	2024	Rp.11.055.500,00	Rp.11.268.829,00	101,93%

**Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS)**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2020	Rp.566.764.696,00	Rp.1.358.389.682,00	239,67%
2	2021	Rp.1.238.777.221,00	Rp.1.584.959.935,00	127,95%
3	2022	Rp.929.082.916,00	Rp.2.825.823.476,00	304,15%
4	2023	Rp.2.300.000.000,00	Rp.2.714.737.608,00	118,03%
5	2024	Rp.5.000.000.000,00	Rp.6.334.504.687,24	126,69%

**BKPN YANG DAPAT DISELESAIKAN**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2020	700	460	42,64%
2	2021	1.075	1.155	107,44%
3	2022	1.080	1.102	102,04%
4	2023	1.200	1.319	109,92%
5	2024	426	180	42,25%

**b. Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kemenkeu**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan, dokumen ini juga menunjukkan peran Kementerian Keuangan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Sesuai dengan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019, Renstra K/L terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1 ini, disajikan kondisi umum Kementerian Keuangan yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Renstra Kementerian Keuangan periode sebelumnya (2015- 2019).

Dalam Renstra periode tersebut, terdapat 7 (tujuh) tujuan yaitu

- a. Terjaganya kesinambungan fiskal,
- b. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai,
- c. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang andal untuk optimalisasi penerimaan negara,
- d. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah,
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran,
- f. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, dan
- g. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Sumber : <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan/rencana-strategis-kemenkeu>

Apabila dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) maka dapat disampaikan perbandingan sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target dalam RPJM (2020-2024)
<b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara</b>			
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	Tingkat Kesesuaian BMN Penggunaan dengan SBSK	88,02 %	57%
	Persentase penerimaan dari kekayaan negara dan lelang	155,07 %	100%
	Persentase Penurunan piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	126,69 %	Tidak ada target dalam RPJM

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target dalam RPJM (2020-2024)
	Indeks Integritas	92,44	Tidak ada target dalam RPJM
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	Persentase tanah BMN bidang yang disertifikatkan	122,34%	100%
	Persentase implementasi kinerja BMN evaluasi (portofolio aset)	125,11%	Tidak ada target dalam RPJM
	Deviasi hasil penilaian ketergunaan	0,78%	29%
	Rata-rata indeks penyelesaian penilaian yang agile, efektif, dan efisien	85,94	Tidak ada target dalam RPJM
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Penyelesaian BKPN Efektivitas	57,75%	100%
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	0%	Tidak ada target dalam RPJM
<b>Peningkatan Pelayanan Lelang</b>			
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase pokok lelang realisasi	156,25%	100%

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target dalam RPJM (2020-2024)
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase produktivitas lelang	120%	34%
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan conventional auction	96,12 %	Tidak ada target dalam RPJM
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	96,12 %	Tidak ada target dalam RPJM
<b>Kesinambungan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Governance, dan Penguatan Kelembagaan</b>			
Pengawasan dan pengendalian yang efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	100%	75%
Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian Yang Efektif	99,15	Tidak ada target dalam RPJM
SDM yang kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	102,80%	Tidak ada target dalam RPJM
Organisasi yang fit for purpose	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	95,24	Tidak ada target dalam RPJM
Pengelolaan Keuangan yang Optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	97,79	95%
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Tidak ada target dalam RPJM

c. Target Pada Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2024

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA					
RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2024					
A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA		: (015) KEMENTERIAN KEUANGAN			
B. VISI		: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"			
	: 01	Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan			
	: 02	Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
C. MISI		: 03 Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif			
	: 04	Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum			
	: 05	Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi			
D. FUNGSI		: 01 PELAYANAN UMUM			
	: 04	EKONOMI			
	: 10	PENDIDIKAN			
E. RINCIAN INFORMASI KINERJA					
KODE	URAIAN	TARGET KINERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)			
		2024	2025	2026	2027
	<b>Sasaran Strategie</b>				
	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75			
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Rasio Defisit terhadap PDB	(2,19)-(2,51)			
	<b>Sasaran Strategie</b>				
	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	66%	66%		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Persentase realisasi penerimaan negara	100%	100%		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,59%-9,55%	8,59%-9,55%		
	<b>Sasaran Strategie</b>				
	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Indeks kualitas belanja pemerintah	84	84		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Indeks ketimpangan antar wilayah	0,232	0,232		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	34,94%	34,94%		
	<b>Sasaran Strategie</b>				
	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Nilai kinerja anggaran KL	82,2	82,2		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,20	3,20		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Persentase instansi pemerintah pusat (KL) yang mendapatkan opini WTP	95%	95%		
	<b>Sasaran Strategie</b>				
	Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial				
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	4		
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategie</b>				
	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	70%	70%		
	<b>Sasaran Strategie</b>				

### 3. Upaya-Upaya *Extra Effort* Yang Dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Upaya Extra Effort yang Dilakukan
1	<p><b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</b></p>	
1a-CP	<p>Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selalu menjalin hubungan baik dengan segenap stakeholder dan mencari solusi bersama untuk setiap permasalahan</li> <li>Pemberitahuan informasi terkait adanya Crash Program dan penggalian potensi dari BKPN yang masuk dalam kriteria Crash Program antara lain penyerahan dari LPDB, DJKN Eks BPPN dan pemerintah daerah.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan satker yang telah terbit persetujuan baik pemanfaatan maupun penjualan agar segera ditindaklanjuti.</li> <li>Melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang baik ke perbankan, Pemda, Satker maupun Pelaku UMKM di wilayah Priangan Timur, melakukan sosialisasi website portal.lelang.go.id ke pelaku UMKM di wilayah Priangan Timur bekerjasama dengan perbankan dan Kemenkeu Satu, memberikan sosialisasi lelang.</li> <li>Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik dan berkelanjutan.</li> </ul>
1b-CP	<p>Indeks Integritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Sosialisasi terkait pencegahan anti korupsi kepada stakeholder dalam kegiatan sosialisasi SBSK kepada Pengguna Barang, Siman V2 dan Sosialisasi dan Edukasi Lelang dalam rangka HUT Lelang ke-116.</li> <li>Integrity Sharing yang diselenggarakan secara online pada tanggal 27 Juni 2024.</li> <li>Sosialisasi antikorupsi internal telah dilakukan secara khusus oleh Kepala KPKNL Tasikmalaya pada tanggal 12 Desember 2024 memperingati HAKORDIA. Bersamaan dengan NGOPI (Ngobrol Perihal) UMKM Kota Tasikmalaya di Aula Lantai 2.</li> <li>Pembuatan video dan sosialisasi terkait integritas melalui medsos (Youtube, IG, FB)</li> <li>Melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai</li> </ul>

		dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa</b>	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi awal dengan satuan kerja target</li> <li>• Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada satuan kerja target tentang pendataan tingkat kesesuaian BMN dengan SBS Kelakukan survei lapangan dalam rangka pendataan BMN dalam rangka mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK</li> <li>• Melakukan survei lapangan dalam rangka pendataan BMN dalam rangka mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK</li> <li>• Melakukan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK</li> </ul>
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi secara berkala dengan satuan kerja sebagai pengingat untuk segera menindaklanjuti Adanya update dan sosialisasi Aplikasi Rebana Seksi PKN. Mengembangkan aplikasi internal DASIMA untuk mempermudah pemantauan tindak lanjut pengelolaan.</li> <li>• Melakukan monitoring terhadap batas waktu persetujuan.</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait tindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan oleh KPKNL Tasikmalaya</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</b>	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang ke Kejaksaan, Satker, Perbankan di wilayah Priangan Timur.</li> <li>• melakukan koordinasi dan penggalan potensi lelang baik ke perbankan, Pemda, Satker maupun Pelaku UMKM di wilayah Priangan Timur, melakukan informasi melalui medsos terkait obyek yang akan dilelang di KPKNL Tasikmalaya.</li> <li>• Melakukan Sharing Session dalam upaya penyelesaian Kredit Macet Lelang Eksekusi Hak Tanggungan bersama PT BRO KC Banjar.</li> <li>• Mendorong dan melaksanakan lelang barang milik PT. PLN Kota Tasikmalaya.</li> </ul>
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atas BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan yang masuk ke dalam penyelesaian kategori II yakni atas seluruh BKPN perolehan 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2023, dan atau ada jaminan namun hanya berupa letter C, Seksi PN telah melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang dan Kantor Pertanahan di</li> </ul>

		<p>wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya. Hal ini perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas terkait status hukum barang yang menjadi jaminan, dan agar terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak penyerah piutang dengan KPKNL Tasikmalaya karena masing-masing pihak memiliki target terkait penyelesaian piutang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan program keringanan Utang tahun 2024 melalui mekanisme Crash Program, melakukan penagihan langsung bersamaan pada saat menyampaikan Surat Paksa dan melakukan Penelitian Lapangan ke lokasi-lokasi debitur.</li> </ul>
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Piutang Negara Seksi PN KPKNL Tasikmalaya berupaya dalam menyelesaikan pengurusan piutang negara dengan terus meningkatkan kerjasama antara KPKNL Tasikmalaya dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengecekan status/pencarian data Perusahaan, pengecekan validitas NIK di website DUKCAPIL. Selain itu telah melaksanakan prosedur SLIK OJK dalam rangka proses Tindakan Keperdataan terutama untuk debitur-debitur yang jumlah utangnya di atas Rp.500.000.000,-. Selain itu dilakukan penggalian potensi piutang yang dapat diserahkan ke KPKNL sehingga terbukanya potensi menyelesaikan BKPN baik dengan pelunasan maupun PSBDT.</li> <li>• Dalam rangka percepatan pengurusan piutang negara pada tahun 2024 telah dilakukan koordinasi baik dengan Kanwil DJKN Jawa Barat, Direktorat PKKN, dan Penyerah Piutang. Lebih lanjut terkait penelitian lapangan, penyampaian Surat Paksa, dan penerbitan PSBDT/Lunas.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalkan 2 JFPP untuk dapat berkolaborasi dengan pegawai lain untuk membentuk tim penilai.</li> <li>• Mengutamakan penugasan JFPP secara perorangan sehingga berkas permohonan dapat dibagi 3 dan penjadwalan penilaian menjadi lebih cepat.</li> <li>• Dalam hal terdapat permohonan penilaian yang mengharuskan dilaksanakan secara TIM,</li> </ul>

		anggotaTim melibatkan penilai/pegawai diluar JFPP.
<b>5</b>	<b>Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif</b>	
5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkoordinasi secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan terkait, guna update informasi terkait kendala maupun progress sertipikasi.</li> <li>Mengirimkan surat permintaan data kepada BPS Se-Priangan Timur.</li> <li>Telah melakukan peninjauan fisik dan melakukan evaluasi kinerja BMN pada Satker target.</li> </ul>
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penggalian data pendukung untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja BMN yang sesuai dengan kondisi riil.</li> <li>Mengirimkan surat permintaan data kepada BPS Se-Priangan Timur.</li> <li>Telah melakukan peninjauan fisik dan melakukan evaluasi kinerja BMN pada Satker target.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif</b>	
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penagihan langsung.</li> <li>Melaksanakan penagihan dan pemberitahuan Crash Program kepada Debitur.</li> <li>Melaksanakan peningkatan tahap pengurusan piutang negara.</li> </ul>
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang ke Kejaksaan, Satker, Perbankan, di wilayah Priangan Timur serta pelaku UMKM Se-Priangan Timur.</li> <li>Menayangkan obyek lelang di medsos KPKNL seperti IG dan FB secara periodik</li> <li>Koordinasi dan penggalian potensi lelang ke perbankan, Balai Lelang, pengadilan, satker, dan pelaku UMKM di wilayah Priangan Timur.</li> <li>Sosialisasi pemanfaatan aplikasi portal.lelang.go.id kepada masyarakat.</li> <li>Memprioritaskan pelaksanaan lelang untuk objek lelang yang potensial laku</li> <li>Koordinasi dengan pemohon lelang terutama yang potensial AYDA.</li> <li>Melakukan sosialisasi terkait website lelang.go.id ke para pelaku UMKM di wilayah Kota Tasikmalaya pada HUT Kota Tasikmalaya.</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>	
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi kegiatan pemaparan konsep laporan penilaian tidak saja secara luring tapi</li> </ul>

	penilaian	<p>juga daring melalui Microsoft Teams.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperhatikan nilai limit/harga sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan nilai dengan tetap berpegang teguh pada prinsip penilaian dan independensi penilai.</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala.</li> <li>• Penyusunan rencana melalui IDP.</li> <li>• Mencatat tambahan rencana karena ada pengembangan kompetensi Mandatory.</li> <li>• Mencatat seluruh realisasi pengembangan kompetensi, yang direncanakan dan yang diluar rencana.</li> <li>• Melaporkan ke Kanwil sesuai dengan waktu yang ditetapkan.</li> </ul>
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).</li> <li>• Penyusunan Sarsaran Kinerja Pegawai (SKP).</li> <li>• Penyusunan Piagam Manajen Risiko (PMR).</li> <li>• Menyusun dan melaporkan laporan terkait pengelolaan kinerja dan pengelolaan pegawai sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.</li> <li>• Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko.</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>	
9a-CP	Target Indeks kualitas anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan berjenjang terhadap kegiatan.</li> <li>• Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, output dan RPD secara rutin dan berkala setiap bulan.</li> <li>• Meningkatkan koordinasi dengan seksi teknis dan pihak-pihak yang terlibat.</li> <li>• Melakukan penyesuaian anggaran dan RPD tiap awal triwulan dan revisi tingkat Kanwil DJPB atau DJA (apabila diperlukan)</li> </ul>
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan konfirmasi antara penginput dropbox dan data pada penyeteroran bendahara terkait perbedaan tanggal buku.</li> <li>• Melakukan konfirmasi dan pengecekan dengan PIC dropbox atas data yang diinput dan membandingkan dengan data pada OMSPAN.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan data dropbox oleh kanwil untuk kesalahan input NTPN atau kekurangan input.</li> <li>Input data NTPN bersamaan dengan menginput data pembayaran setelah dilakukan pemindahbukuan biad ke kas negara.</li> </ul>
<b>10</b>	<b>Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif</b>	
10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website yaitu berupa Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Daftar Informasi Publik yang Wajib diumumkan secara Serta Merta, Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat.</li> </ul>
<b>11</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah</b>	
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan Profilling pegawai.</li> <li>Telah dilaksanakan EPITE.</li> <li>Telah dilaksanakan PPKEKP.</li> <li>Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Stakeholder melalui Survei Persepsi</li> <li>Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).</li> <li>Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan, Whistleblowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan.</li> </ul>
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>KPKNL Tasikmalaya telah menjawab pertanyaan dan mengupload seluruh bukti dokumen pada Aplikasi DIA dan telah dilakukan submit, pada tanggal 28 Maret 2024, lebih cepat dari target submit 31 Maret 2024, dengan harapan Tim dari</li> <li>Kantor Pusat DJKN dapat segera melakukan koreksi apabila ada kekurangan dapat segera ditindaklanjuti.</li> <li>Field Evaluation oleh Tim dari Kantor Pusat DJKN pada tanggal 15 Agustus 2024.</li> <li>Melengkapi kekurangan data berdasarkan pemeriksaan dari Tim Kantor Pusat DJKN, KPKNL Tasikmalaya.</li> </ul>

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Keberhasilan KPKNL Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak terlepas dari strategi maupun langkah langkah yang telah direncanakan oleh masing-masing seksi. Berikut analisis keberhasilan maupun alternatif solusi yang telah dilakukan KPKNL Tasikmalaya:

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kerja Tahun 2024	Penyebab	Alternatif Solusi yang telah dilakukan
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</b>			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Berhasil melampaui target karena berbagai upaya kolaborasi tiap unit layanan bersama pengguna jasa layanan. Daya beli masyarakat meningkat dan koordinasi yang baik antara KPKNL dengan stakeholder.		Penggalian potensi dengan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa
1b-CP	Indeks Integritas	Berhasil melampaui target dan pada IKU ini Penilaian dilakukan oleh internal dan eksternal berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) sehingga tingkat kendali lemah.		Mempelajari dan mengamalkan Integritas serta Intimasi yang baik kepada responden
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa</b>			
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan dan pengguna jasa layanan PKN.		Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa layanan PKN.
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan dan pengguna jasa layanan PKN. Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL dan satuan kerja.		Penggalian potensi, Monitoring dan koordinasi serta sinergi antar unit dan pengguna jasa layanan PKN. Solusi : Mendorong satuan kerja untuk segera menindaklanjuti surat persetujuan yang telah terbit
<b>3</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</b>			
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Koordinasi pengurusan piutang negara baik dengan Kanwil		Koordinasi dengan Penyerah Piutang

		DJKN Jawa Barat, Direktorat PKN, dan Penyerah Piutang, dalam dukungan penelitian lapangan, penyampaian Surat Paksa, dan penerbitan PSBDT/Lunas.	
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	Koordinasi pengurusan piutang negara baik dengan Kanwil DJKN Jawa Barat, Direktorat PKN, dan Penyerah Piutang, dalam dukungan penelitian lapangan, penyampaian Surat Paksa, dan penerbitan PSBDT/Lunas.	Koordinasi dengan Penyerah Piutang
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN)	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan dan pengguna jasa piutang negara.	Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa piutang negara.
<b>4</b>	<b>Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>		
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan dan pengguna jasa penilaian dan Seksi PKN.	Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa penilaian dan Seksi PKN.
<b>5</b>	<b>Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif</b>		
5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan dan pengguna jasa layanan PKN. Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL Tasikmalaya, Kantor Pertanahan, Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait	Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa layanan PKN. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait dalam rangka percepatan sertipikasi.
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan dan pengguna jasa layanan PKN. Koordinasi yang baik antara pihak KPKNL dan Satuan Kerja, serta pihak lain yang terlibat.	Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa layanan PKN. Koordinasi dengan Satuan Kerja dan pihak lain yang terkait.
<b>6</b>	<b>Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang</b>		

	<b>produktif</b>		
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan dan pengguna jasa piutang negara.	Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa piutang negara.
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan dan pengguna jasa layanan Lelang.	Penggalian potensi dengan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa layanan Lelang.
<b>7</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>		
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan dan pengguna jasa penilaian dan Seksi PKN.	Monitoring dan dengan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa penilaian dan Seksi PKN
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>		
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan Subbagian Umum.	Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa layanan Subbagian Umum.
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan Kepatuhan Internal	Menyusun dan melaporkan laporan terkait pengelolaan kinerja dan pengelolaan pegawai sesuai dengan norma waktu yang diteapkan Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan manajemen risiko.
<b>9</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>		
9a-CP	Target Indeks kualitas anggaran	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan Pengelola Anggaran	Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa layanan Pengelola Anggaran

9b-CP	Persentase deviasi data PNBPFungsional DJKN	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan lelang.	Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa layanan lelang.
<b>10</b>	<b>Komunikasi publik yang efektif</b>		
10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan di KPKNL Tasikmalaya.	Monitoring tiap penilaian capaian IKU dan melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan tiap unit KPKNL Tasikmalaya.
<b>11</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah</b>		
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan Subbagian Umum dan Pengelola Anggaran.	Monitoring dan koordinasi dan sinergi antar unit dan pengguna jasa layanan Subbagian Umum dan Pengelola Anggaran.
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Berhasil melampaui target berkat koordinasi dan kolaborasi antar unit layanan di KPKNL Tasikmalaya.	Memonitoring atas tindak lanjut dalam pengisian kekurangan data berdasarkan pemeriksaan dari Tim Kantor Pusat DJKN.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Capaian NKPA (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran) TA 2024 Satuan Kerja KPKNL Tasikmalaya mencapai 100. Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian variabel efektivitas dan efisiensi. Nilai ini merupakan bagian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja. IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai BUN. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Aspek kualitas perencanaan anggaran dalam IKPA menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan. Aspek ini mencakup dua indikator, yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA. Variabel yang dinilai dalam perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran adalah:

- Efektivitas, yang dinilai dari capaian RO, capaian Sasaran Program, dan capaian Sasaran Strategis

- a. Efisiensi, yang dinilai dari penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU.  
Data Rincian Output.

No	Rincian Output	Anggaran		Volume			RVRO/TVRO
		Usulan Pagu Akhir	Proyeksi Realisasi s.d. 31 Des 2024	Target (TVRO)	Satuan	Proyeksi Realisasi (RVRO)	
1	4796.AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	12,150,000	10,300,000	150	Orang	175	100.00
2	4796.AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	4,717,000	3,500,000	50	Orang	55	100.00
3	4796.AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	9,476,000	6,127,000	60	Orang	80	100.00
4	4798.AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	60,124,000	49,121,540	50	Surat Keputusan	50	100.00
5	4798.AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	49,272,000	49,481,000	500	Surat Keputusan	747	100.00
6	4798.ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	24,765,000	22,970,000	92	Rekomendasi Kebijakan	93	100.00
7	4798.ABA.003 Rekomendasi Hasil Kajian Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	36,720,000	30,850,200	893	Rekomendasi Kebijakan	1048	100.00
8	4798.BAE.301 Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	40,000,000	38,124,367	20	UMKM	24	100.00
9	4798.BAH.001 Risalah Lelang	23,920,000	22,504,000	700	Dokumen	954	100.00
10	4798.FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	8,584,000	6,040,000	1	Rekomendasi	1	100.00
11	4798.FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	14,416,000	12,180,382	1	Rekomendasi	1	100.00
12	4798.FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	60,000,000	56,888,914	2	Rekomendasi	2	100.00
13	4798.FAE.301 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	37,947,000	34,535,500	169	Rekomendasi	765	100.00
14	4798.FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	63,442,000	53,592,860	11	Aset	11	100.00
15	4798.UAK.201 Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	32,855,000	12,015,000	4	Aset	4	100.00
16	4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	15,544,000	15,278,300	4	Layanan	4	100.00
17	4701.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	0	Unit	0	
18	4701.EBA.002 Kerumahtanggaan	58,417,000	50,216,575	12	Layanan	12	100.00
19	4701.EBA.994 Layanan Perkantoran	1,757,487,000	1,610,332,053	12	Layanan	12	100.00
20	4701.EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	258,939,000	216,500,000	39	Unit	39	100.00
21	4701.EBB.003 Kendaraan Bermotor	375,280,000	364,200,000	3	Unit	3	100.00
22	4701.EBB.004 Gedung/Bangunan	902,323,000	792,041,551	1010	M2	1010	100.00
23	4702.BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	5,336,000	4,776,800	30	Orang	42	100.00
24	4702.BMB.002 Kehumasan	16,872,000	16,513,500	4	Kegiatan	4	100.00
25	4702.BMB.003 Pameran/Eksibisi	-	-	0	Kegiatan	0	
26	4704.EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	13,274,000	10,798,293	5	Dokumne	5	100.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,881,860,000</b>	<b>3,478,089,542</b>	<b>CAPAIAN RO</b>	<b>100.00</b>	<b>3,881,860,000</b>	<b>3,478,089,542</b>

## b. Data Pengguna SBK

No	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Proyeksi Realisasi s.d. 31 Des 2024	Proyeksi Realisasi Volume RO s.d. 31 Des 2024	Indeks Realisasi Anggaran	Penggunaan SBK	Keterangan
1	4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	SBKU	21,488,000	15,278,300	4	3,819,575	Ya	Good Job
2	4702.BMB.002 Kehumasan	SBKU	458,000,000	16,513,500	4	4,128,375	Ya	Good Job
<b>NILAI PENGGUNAAN SBK</b>							<b>100.00</b>	

## c. Data Efisiensi SBK

No	RO	Jenis SBK	Indeks SBK	Proyeksi Realisasi s.d. 31 Des 2024	Target RO Pada DIPA	Proyeksi Realisasi Volume RO s.d. 31 Des 2024	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	4700.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	SBKU	21,488,000	15,278,300	4	4	3,819,575	17,668,425	82.22	20.00	Diperhitungkan maksimal 20%
2	4702.BMB.002 Kehumasan	SBKU	458,000,000	16,513,500	4	4	4,128,375	453,871,625	99.10	20.00	Diperhitungkan maksimal 20%
<b>NILAI EFISIENSI SBK</b>										<b>20.00</b>	
<b>NILAI EFISIENSI SBK KONVERSI</b>										<b>100</b>	

## d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	Capaian Rincian Output	100.00	75.00%	75.00
2	Penggunaan SBK	100.00	10.00%	10.00
3	Efisiensi SBK	100.00	15.00%	15.00
<b>Capaian NKPA</b>				<b>100.00</b>

## e. Penggunaan Sumber Daya

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Tasikmalaya dalam rangka pembinaan di kepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2024, disampaikan sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai ASN : 27 orang
2. Kenaikan pangkat : 1 orang
3. Kenaikan Gaji Berkala : 14 orang
4. Ijin belajar : 0 orang
5. Pegawai pensiun : 0 orang
6. Pegawai mengikuti diklat : 27 orang

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

KPKNL Tasikmalaya memiliki beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</b>	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Selalu menjalin hubungan baik dengan segenap stakeholder dan mencari solusi bersama untuk setiap permasalahan
1b-CP	Indeks Integritas	Melakukan Sosialisasi terkait pecegahan anti korupsi kepada stakeholder dalam kegiatan sosialisasi SBSK kepada Pengguna Barang, Siman V2, SMKN 1 Tasikmalaya Visit KPKNL Tasikmalaya, NGOPI UMKM-Hakordia dan Sosialisasi dan Edukasi Lelang dalam rangka HUT Lelang ke-116 oleh kepala kantor dan Seksi Kepatuhan Internal serta dipublikasi pada media sosial.
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa</b>	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan dokumen pendukung, dan melakukan perhitungan SBS.
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	Adanya Aplikasi Rebana Reksa Bandha Nagara (Menjaga Aset Negara) KPKNL Tasikmalaya. Dengan adanya aplikasi tersebut hasil kinerja dan pengambilan keputusan pun dapat dilakukan dengan baik dan mudah berdasarkan data yang ada. Mengembangkan menu Dashboard Administrasi dan Supporting Informasi Manajemen Aset (DASIMA) untuk mempermudah pemantauan terhadap pengelolaan BMN.
<b>3</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</b>	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang.
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	Penyampaian Surat Paksa, Penyampaian Crash Program Keringanan Utang, pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN)	Penyampaian Surat Paksa, Penyampaian Crash Program Keringanan Utang, pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara

<b>4</b>	<b>Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	Memberikan edukasi kepada pemohon penilaian, membentuk dan menjadwalkan survei penilaian yang efektif dan efisien.
<b>5</b>	<b>Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif</b>	
5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	Melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	Membuat dan membagikan form pendataan BMN kepada satuan kerja, mengumpulkan data pendukung, dan menginput data pada SIMAN V2.
<b>6</b>	<b>Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif</b>	
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	Penyampaian Surat Paksa, Penyampaian Crash Program Keringanan Utang, pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	Melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang.
<b>7</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>	
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	Memperhatikan nilai limit/harga sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan nilai dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip penilaian dan independensi penilai.
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Monitoring keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi secara berkala. Penyusunan rencana melalui IDP. Mencatat tambahan rencana karena ada pengembangan kompetensi Mandatory. Mencatat seluruh realisasi pengembangan kompetensi, yang direncanakan dan yang diluar rencana. Melaporkan ke Kanwil sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Piagam Manajen Risiko (PMR). Menyusun dan melaporkan laporan terkait pengelolaan kinerja dan pengelolaan pegawai sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan. Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan

		manajemen risiko.
<b>9</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>	
9a-CP	Target Indeks kualitas anggaran	Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, output dan RPD secara rutin dan berkala setiap bulan.
9b-CP	Persentase deviasi data PNPB Fungsional DJKN	Melakukan pengecekan data dropbox oleh kanwil untuk kesalahan input NTPN atau kekurangan input.
<b>10</b>	<b>Komunikasi publik yang efektif</b>	
10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Melakukan Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada Website yaitu berupa Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Daftar Informasi Publik yang Wajib diumumkan secara Serta Merta, Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat.
<b>11</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah</b>	
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan, Whistleblowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan.
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Monev ZI-WBBM yang rutin dan berkelanjutan. Jawab dan Uploud bukti pada aplikasi DIA serta Melengkapi kekurangan data berdasarkan pemeriksaan dari Tim Kantor Pusat DJKN.

## 7. Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Risiko yang akan dimitigasi beserta tindak lanjut penanganannya adalah sebagai berikut:

- Untuk risiko satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah koordinasi dengan satuan kerja terkait tindak lanjut persetujuan yang telah diterbitkan pada satuan kerja;
- Untuk risiko satuan kerja tidak menyampaikan laporan wasdal tepat waktu, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara telah menyampaikan imbauan penyusunan laporan pengawasan dan pengendalian dan koordinasi berkelanjutan dengan satuan kerja terkait penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian;
- KPKNL Tasikmalaya melalui Seksi PKN pun memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang optimal dalam kinerja pengelolaan BMN seperti peraih PNPB tertinggi dan hal tersebut akan dilanjutkan dan dikembangkan.
- Unit Pelayanan Penilaian pada Tahun 2024 telah menyusun rencana aksi tahunan dan triwulanan berdasarkan situasi kondisi dan capaian kinerja tiap triwulan, hasilnya rencana aksi yang telah disusun dan dilaksanakan berhasil mencapai target kinerja. Hasil ini merupakan hasil kerjasama antar Pegawai Unit Pelayanan Penilaian, Unit Teknis dan Pendukung KPKNL Tasikmalaya, Kanwil DJKN Jawa Barat maupun stakeholder Unit Pelayanan Lelang di wilayah

- Untuk risiko banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih, Seksi Piutang Negara telah melakukan penagihan Piutang Negara dan menyelesaikan BKPn dengan 4 cara yaitu pelunasan, PSBDT, pengembalian, atau penarikan.

## 8. Rencana Aksi Ke Depan Tahun 2024

Rencana aksi KPKNL Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Rencana Aksi Ke Depan
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</b>	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Penggalan potensi lelang, piutang negara dan PNBp, termasuk terhadap BMN di Satker yang sudah tidak digunakan. Sosialisasi dengan pihak pemohon lelang baik Satker, Bank, maupun Balai Lelang. Apresiasi terhadap pembeli lelang serta pemohon lelang dengan pokok lelang terbesar dan produktivitas lelang terbaik serta pengguna jasa layanan piutang negara dan pengelolaan BMN Menggalkan publikasi lelang, piutang negara, dan PNBp BMN melalui berbagai media.
1b-CP	Indeks Integritas	Mempelajari dan mengamalkan Integritas serta Intimasi yang baik kepada responden
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa</b>	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	Melakukan survei lapangan dalam rangka pendataan BMN dalam rangka mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Melakukan perhitungan tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK Melakukan perhitungan optimalisasi BMN dengan SBSK
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	Mengirimkan surat pemberitahuan kepada satuan kerja untuk segera menindak lanjut surat persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan. Terhadap persetujuan yang tidak ditindaklanjuti dan telah melewati batas waktu akan dikirimkan surat klarifikasi dan permintaan penertiban kepada satuan kerja terkait.
<b>3</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</b>	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Selalu menjalin hubungan baik dengan segenap stakeholder dan mencari solusi bersama untuk setiap permasalahan dan mendorong pemohon lelang dengan nilai cukup besar supaya melakukan lelang ulang.

3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	Oleh karena Crash Program Keringanan Utang untuk tahun berikutnya tidak ada, maka pengoptimalan penagihan harus lebih ditingkatkan baik melalui surat, pengumuman di media masa, dan penagihan secara langsung. Tindakan dimaksud berupa panggilan, kunjungan ke debitur/penelitian lapangan, pemeriksaan, tindakan keperdataan, dan penjualan barang jaminan.
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN)	Oleh karena Crash Program Keringanan Utang untuk tahun berikutnya tidak ada, maka pengoptimalan penagihan harus lebih ditingkatkan baik melalui surat, pengumuman di media masa, dan penagihan secara langsung. Tindakan dimaksud berupa panggilan, kunjungan ke debitur/penelitian lapangan, pemeriksaan, tindakan keperdataan, dan penjualan barang jaminan.
<b>4</b>	<b>Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	Memberikan edukasi dan koordinasi kepada pemohon agar permohonan dapat sesuai aturan sehingga penjadwalan survei dan penyelesaian layanan penilaian efektif dan efisien
<b>5</b>	<b>Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif</b>	
5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	Monitoring dan koordinasi dengan satuan kerja terkait pensertipikatan agar sesuai target.
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	Melakukan koordinasi dengan satuan kerja target evaluasi kinerja BMN tahun 2024 dan satuan kerja target tindak lanjut rekomendasi tahun 2023. Melakukan survey lapangan kegiatan evaluasi kinerja BMN tahun 2024. Melakukan perhitungan evaluasi kinerja BMN tahun 2024.
<b>6</b>	<b>Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif</b>	
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	Komunikasi secara berkala dengan satuan kerja sebagai pengingat untuk segera menindaklanjuti Adanya update dan sosialisasi Aplikasi RebaNa Seksi PKN
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	Koordinasi dan penggalan potensi lelang ke perbankan, Balai Lelang, pengadilan, satker, dan pelaku UMKM
<b>7</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>	
7a-CP	Persentase ketergunaan deviasi hasil	Memperhatikan nilai limit/harga sewa yang diajukan oleh pemohon sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan nilai dengan

	penilaian	tetap berpegang teguh pada prinsip prinsip penilaian dan iindependensi penilai
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Terus mencatat tambahan atas rencana pengembangan kompetensi karena ada intervensi pengembangan kompetensi Mandatory. Terus mencatat realisasi pengembangan kompetensi di luar rencana, sebagai bahan perbaikan rencana dikemudian hari.
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Melakukan sosialisasi Internal terkait pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja Pegawai. Melaksanakan sosialisasi internal terkait manajemen risiko.
<b>9</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>	
9a-CP	Target Indeks kualitas anggaran	Melanjutkan tindakan yang telah dilaksanakan, diantaranya: melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, output dan RPD secara rutin dan berkala setiap bulan dan/atau melakukan penyesuaian anggaran dan RPD tiap awal triwulan dan revisi tingkat Kanwil DJPB atau DJA (apabila diperlukan).
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	Melakukan penarikan data PNBPN dari aplikasi OMSPAN untuk konfirmasi ke penginput dropbox. Input data pembayaran bersamaan dengan input NTPN pada aplikasi FocusPN.
<b>10</b>	<b>Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif</b>	
10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Secara konsisten melakukan penyediaan dan pemutakhiran layanan informasi publik pada Website. Menyampaikan Informasi Publik atas masuknya permintaan Informasi Publik dari Pengguna Layanan.
<b>11</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah</b>	
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	Melakukan monev atas survey Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.
11b-N	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Terus jalankan program kerja dan Arsipkan dokumentasi kegiatan dengan baik.

## B. Kinerja Lainnya

### a. Penghargaan KPKNL Tasikmalaya selama Tahun 2024.

Selama Tahun 2024, KPKNL Tasikmalaya tidak pernah menerima penghargaan yang diterima unit dari institusi/Lembaga di luar Kemenkeu selama tahun 2024. KPKNL Tasikmalaya, berhasil menerima penghargaan dari Kanwil DJKN Jawa Barat berupa Nilai NKO Tw I Tahun 2024 dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu berupa Mempertahankan Predikat ZI-WBBM Tahun 2022 melalui Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI-WBBM di Lingkungan DJKN Tahun 2024. Bukti terlampir.

### b. Achievement capaian/inovasi yang diraih unit selama tahun 2024

Inovasi Sadinten Rengse dan Dua Dinten Rengse dicabut dengan adanya janji layanan yang lebih cepat dari SOP. Galang Semangat Pagi terus dilaksanakan pada Hari Senin secara *offline* maupun Hari Kamis secara *online* Ms.Teams.

### c. Replikasi atau penduplikasian sistem kinerja/proses bisnis oleh instansi lain diluar Kemenkeu selama tahun 2024

KPKNL Tasikmalaya hanya pernah kedatangan Kejaksaan Negeri Garut untuk melaksanakan study tiru pembangunan ZI-WBBM pada tahun 2024 dan belum dapat dibuktikan dengan dokumen replikasi serta Benchmarking oleh K/L lain dengan tujuan menjadikan Kemenkeu sebagai salah satu referensi dalam perbaikan proses bisnis maupun organisasi K/L dimaksud.

### d. Parameter Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Parameter GEDSI meliputi:

- Kesetaraan gender

Seluruh pegawai KPKNL Tasikmalaya baik perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengakses, berpartisipasi, dan mengelola sumber daya yang sama sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki untuk mendukung proses bisnis di KPKNL Tasikmalaya.

- Disabilitas

Pengguna jasa KPKNL Tasikmalaya termasuk Penyandang disabilitas difasilitasi peralatan dan fasilitas khusus dalam layanan prioritas di Area Pelayanan Terpadu (APT) sehingga mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan publik dan berpartisipasi dalam pembangunan.

- Inklusi sosial

KPKNL Tasikmalaya pun tidak lupa untuk berbagi baik dalam kegiatan peringatan hari tertentu seperti Bulan Ramadhan, Hari Kekayaan Negara, maupun situasi tertentu seperti bencana alam dan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan, kesempatan, dan martabat kelompok masyarakat yang membutuhkan baik di wilayah kerja maupun diluar wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya.

### C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPKNL Tasikmalaya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

#### 1. Penyerapan Anggaran

Pagu DIPA KPKNL Tasikmalaya tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.881.860.000, dengan rincian belanja barang sebesar Rp 2.345.318.000 dan belanja modal sebesar Rp1.536.542.000. Realisasi belanja s.d. Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Penyerapan berbasis akrual (transaksi di SAKTI):

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	2.345.318.000	1.783.733.173	90,23
2	Belanja Modal	1.536.542.000	1.280.418.953	89,34
<b>Total</b>		<b>3.881.860.000</b>	<b>3.064.152.126</b>	<b>89,88</b>

#### 2. Realisasi Penyerapan berbasis Kas (transaksi yang sudah SP2D di OMSPAN):

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Barang	2.345.318.000	2.115.146.284	90,23
2	Belanja Modal	1.536.542.000	1.372.741.551	89,34
<b>Total</b>		<b>3.881.860.000</b>	<b>3.487.887.835</b>	<b>89,88</b>

#### 1. Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Tasikmalaya sebagai berikut:

Capaian IKI Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKI IKKPA)

Capaian IKI Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. bulan Desember 2024 adalah sebesar 108,58 dari target 100 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Indikator IKI	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
<b>A) Nilai IKPA (Bobot 50%)</b>			<b>99,57</b>
1. Revisi DIPA	100	10	10%
2. Deviasi Hal III DIPA	100	10	12,72%
3. Penyerapan Anggaran	100	20	18%
4. Belanja Kontraktual	95,71	10	9,80%
5. Penyelesaian Tagihan	100	10	10%
6. Pengelolaan UP dan TUP	100	10	9,85%
7. Dispensasi SPM	100	5	0
8. Capaian Output	100	25	25%
<b>B) Nilai SMART (Bobot 50%)</b>			<b>100%</b>
1. Capaian Rincian Output	43,5	43,5	43,5

2. Efisiensi	81,01	28,60	23,17
3. Konsistensi Penyerapan Anggaran	99,26	18,20	18,07
4. Penyerapan Anggaran	91,14	9,7	8,84
<b>Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Desember 2024</b>			<b>96,57</b>
<b>Target IKI IKKPA</b>			<b>100,00</b>
<b>Realisasi IKI IKKPA s.d. Desember 2024</b>			<b>108,58</b>
<b>Indeks Capaian Kinerja IKI IKKPA s.d. Desember 2024</b>			<b>108,58%</b>

2. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 :

<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Besaran</b>
PNBP Aset	Rp4.436.4666.592,00
Biad PPN	Rp11.268.829,00
PNBP berupa bea lelang	Rp5.687.995.179,00
<b>Total Pendapatan Negara Bukan Pajak</b>	<b>Rp.10.135.730.600,00</b>

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja KPKNL Tasikmalaya secara umum pada Tahun Anggaran 2024 adalah sangat baik. KPKNL Tasikmalaya telah melakukan yang terbaik dalam usaha memenuhi target pada indikator-indikator tersebut dengan inovasi-inovasi yang di buat. Perencanaan dan strategi-strategi dibahas pimpinan dengan seluruh pegawai maupun dengan stakeholder untuk baik dengan Dialog Kinerja Organisasi maupun dengan *Focus Grup Discussion*, sosialisasi baik melalui daring maupun luring dikantor maupun langsung kepada masyarakat. Hasilnya hampir seluruh target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2024 tercapai sebesar 116,24%.

Keseluruhan target yang telah ditetapkan melalui Indikator-indikator kinerja utama telah mencapai realisasi sesuai atau bahkan melampaui target dan beberapa penghargaan yang didapat juga merupakan dedikasi yang tinggi dari pegawai KPKNL Tasikmalaya. Pada Tahun 2019 dan 2022 KPKNL Tasikmalaya telah meraih predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM hal ini dibangun bersama baik internal pegawai KPKNL Tasikmalaya dengan seluruh stakeholder pada KPKNL Tasikmalaya serta arahan dan bimbingan dari Kantor Pusat DJKN maupun dari Kanwil DJKN Jawa Barat.


Dengan tetap menjaga nilai-nilai kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan serta menjalankan motto KPKNL Tasikmalaya yaitu "PASTI", Profesional, Amanah, Santun, Transparan, Inovatif kami optimis dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Diharapkan dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai maupun yang ingin diraih tersebut, menjadi motivasi bagi segenap pegawai baik ditingkatan pelaksana sampai pimpinan untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Kedepan KPKNL Tasikmalaya berkomitmen menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja dengan integritas dan pelayanan prima yang bebas korupsi kepada stakeholder KPKNL Tasikmalaya.

## LAMPIRAN

## Daftar Penghargaan yang Diraih KPKNL Tasikmalaya Tahun 2024

No	Kategori Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1.	Peringkat pertama atas capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 115,18% yang merupakan NKO peringkat pertama tahun 2024 di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat	Kanwil DJKN Jawa Barat	KPKNL Tasikmalaya
2.	Mempertahankan Predikat ZI-WBBM Tahun 2022 melalui Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI-WBBM di Lingkungan DJKN Tahun 2024	Rapat Pleno Tim Penilai Kementerian (TPK dhi. Itjen) dan Biro Organta Sekretariat Jenderal Kemenkeu	KPKNL Tasikmalaya





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
GEDUNG STAF/PLORON PROSOFANESWARA 8 LANTAI 7 UTARA LPTJ JALAN LINGKARAN BAKTIUNG TIRUR NOMOR 3-4, JAKARTA 10716, CALL CENTER 1600691, SITUS WWW.DJKN.KEMENDU.GOV.ID

**NOTA DINAS**  
**NOMOR ND-4317/KN.1/2024**

Yth. : Pimpinan Unit Kerja sebagaimana terlampir  
 Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : Satu berkas  
 Hal : Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Predikat ZI-WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan DJKN Tahun 2024  
 Tanggal : 22 November 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pemantauan dan evaluasi keberlanjutan predikat ZI menuju WBK dan ZI menuju WBBM pada unit kerja di lingkungan DJKN tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan KMK Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:
  - Pra-evaluasi;
  - Desk evaluation;
  - Validasi survei;
  - Wawancara dan evaluasi lapangan;
  - Clearance internal dan eksternal;
  - Pleno Tim Penilai Kementerian (TPK); dan
  - Penetapan hasil pemantauan dan evaluasi ZI-WBK/WBBM.
- Berdasarkan hasil rapat pleno yang diselenggarakan oleh Tim Penilai Kementerian (TPK dhi. Inspektorat Jenderal) dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pleno nomor BA-5/SJ.2/2024 dan BA-12/JU.8/2024 tanggal 31 Oktober 2024, diperoleh hasil bahwa unit kerja Saudara/i dinyatakan masuk dalam kategori keberlanjutan predikat ZI-WBK/WBBM.
- Berknaan dengan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, kami menyampaikan apresiasi atas upaya dan komitmen Saudara/i beserta seluruh jajaran dalam mempertahankan predikat ZI-WBK/WBBM dan berharap agar Saudara/i terus meningkatkan penguatan integritas serta kualitas pemberian layanan sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang termuat dalam KMK Nomor 395/KM.1/2024 sehingga


2

kegiatan pembangunan ZI-WBBM dan/atau pemantauan dan evaluasi keberlanjutan ZI-WBK/WBBM pada periode mendatang dapat berjalan optimal;

4. Selanjutnya, apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, Saudara/i dapat menghubungi Sdr. Yan Isnur Aji (082298483643) sebagai narahubung kami.

Sekretariat DJKN berkomitmen menjaga integritas untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
**Dedi Syarif Usman**


Tembusan:

- Direktur Jenderal Kekayaan Negara
- Inspektur IV
- Inspektur VII
- Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
- Kepala Bagian Kepatuhan Internal

**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBERLANJUTAN PREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN DJKN TAHUN 2024**  
**(KATEGORI KEBERLANJUTAN PREDIKAT ZI MENUJU WBK ATAU ZI MENUJU WBBM)**

No	Unit Kerja	Predikat
1	Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara	WBK
2	Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur	WBK
3	Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku	WBK
4	Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	WBK
5	Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	WBK
6	KPKNL Ambon	WBK
7	KPKNL Bandar Lampung	WBK
8	KPKNL Bandung	WBK
9	KPKNL Banjarmasin	WBK
10	KPKNL Blak	WBK
11	KPKNL Cirebon	WBK
12	KPKNL Denpasar	WBK
13	KPKNL Mataram	WBK
14	KPKNL Medan	WBK
15	KPKNL Padang	WBK
16	KPKNL Palangkaraya	WBK
17	KPKNL Palopo	WBK
18	KPKNL Pare-pare	WBK
19	KPKNL Pontianak	WBK
20	KPKNL Purwakarta	WBK
21	KPKNL Semarang	WBK
22	KPKNL Singaraja	WBK
23	Kantor Wilayah DJKN Aceh	WBBM
24	Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat	WBBM
25	Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara	WBBM
26	KPKNL Balikpapan	WBBM
27	KPKNL Bima	WBBM
28	KPKNL Bontang	WBBM
29	KPKNL Dumai	WBBM
30	KPKNL Kendari	WBBM

31	KPKNL Pangkajene Pinrang	WBBM
32	KPKNL Pangkalan Bun	WBBM
33	KPKNL Pematang Siantar	WBBM
34	KPKNL Purwokerto	WBBM
35	KPKNL Samarinda	WBBM
36	KPKNL Sorong	WBBM
37	KPKNL Tarakan	WBBM
38	KPKNL Tasikmalaya	WBBM
39	KPKNL Ternate	WBBM



Ditandatangani secara elektronik  
**Dedi Syarif Usman**